

PARTISIPASI LEMBAGA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM KEGIATAN PRAKERIN SISWA SMK PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Agustunizar

SMA N 5 Lubuklinggau Jl. Soekarno Putri Kelurahan Mesat Seni
e-mail: dadangtunizar@yahoo.co.id.

Abstract: The objective of this study is to describe the participation of state and private institution in students' industry work praxis of accounting and office administration expertise program of State Vocational School One of Lubuklinggau District. This study used qualitative descriptive method. The subjects of this study consist of principal, the vice of principal, the head of study program, teachers, and students. The data were collected by interview, observation and documentation. Data were analyzed by using the qualitative. The result show that the government and the private institution have actively participate in student industry work practice at vocational senior high school number 1 Lubuklinggau.

Keyword: government, institutions, private, vocational high school

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang Partisipasi lembaga pemerintahan dan swasta dalam kegiatan prakerin siswa SMK program keahlian akuntansi dan administrasi perkantoran pada SMK Negeri 1 Lubuklinggau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini mencakupi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program studi, guru, siswa. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Data di analisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga swasta ikut berperan aktif dalam kegiatan praktek kerja industri pada SMK Negeri 1 Lubuklinggau.

Kata kunci: pemerintah, lembaga, swasta, SMK

PENDAHULUAN

Sekolah kejuruan merupakan sekolah yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk siap memasuki dunia kerja. Namun disinyalir belum sepenuhnya lembaga kejuruan memenuhi tuntutan dunia kerja sebagai pemasok lulusan yang menghasilkan tenaga kerja professional. Selama ini kualitas lulusan lembaga pendidikan kejuruan dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan pasaran ketenagakerjaan. Akibatnya beberapa industri/usaha cenderung memilih lulusan pendidikan umum untuk direkrut sebagai tenaga kerja, dengan alasan lulusan lembaga pendidikan umum lebih mudah untuk dilatih. Di samping itu, kenyataan pendidikan kejuruan di Indonesia mengalami beberapa gejala yang memprihatinkan, antara lain sebagaimana yang disampaikan oleh mantan Mendiknas Wardiman berikut: 1) Sampai saat ini pertumbuhan pendidikan menengah kejuruan (SMK) relatif

lebih lambat dibanding pertumbuhan Sekolah Menengah Atas (SMA). 2) Sebagai investasi yang relatif lamban ini maka SMK menjadi kurang diminati oleh sebagian besar lulusan SMP, sehingga pendaftar yang masuk ke SMK sebagian besar berasal dari siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang relatif rendah. 3) Motivasi lulusan SMP yang relatif rendah ini di sebabkan oleh kecenderungan yang disimpulkan dari beberapa penelitian bahwa relevansi tamatan SMK terhadap kebutuhan lapangan kerja tidak berbeda dengan tamatan sekolah umum, baik dilihat dari persentase tamatan yang bekerja maupun lamanya masa tunggu sebelum bekerja. 4) Belum semua jenis program dapat memperlihatkan perbedaan warna profesi/kejuruannya dibandingkan dengan sekolah umum. 5) Relevansi dan mutu pendidikan kejuruan masih perlu ditingkatkan, serta dipacu dan diperluas ke bidang-bidang lain secara

meluas, terutama yang berorientasi terhadap kebutuhan ekonomi setempat. (Wardiman, 1994)

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, masyarakat dan Negara. Oleh karena itu sekolah harus proaktif menggandeng pihak DU/DI sebagai institusi pasangan untuk memecahkan permasalahan secara bersama sehingga apa yang menjadi hambatan dan masalah pada pihak sekolah kejuruan sebagai pencetak tenaga kerja siap pakai dan DU/DI sebagai pengguna lulusan dapat diatasi. Dengan kata lain prakerin tidak akan berhasil jika tidak ada kerja sama antara sekolah dengan institusi pasangan.

Hasil penelitian Candra Sri Retno (2001) menyatakan bahwa dari beberapa Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) yang menjadi institusi pasangan SMK Negeri 1 Lubuklinggau hanya beberapa saja yang benar-benar bersedia bekerjasama, dalam arti ada DU/DI yang bersedia karena ada himbauan dari Pemerintah untuk dapat menjadi mitra sekolah dalam pelaksanaan PRAKERIN.

Lembaga Pemerintah dan Swasta adalah mitra kerja sama yang bergerak bergerak pada bidang jasa dan industri yang menjadi institusi pasangan bagi Sekolah Menengah Kejuruan kelompok Bisnis Manajemen (dalam hal ini SMK Negeri 1 Lubuklinggau) khususnya program keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran, yang memiliki beberapa kelebihan dibanding institusi pasangan yang lain, yaitu: 1) Hanya ada satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (program keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran) yang mengadakan kesepakatan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Swasta, yaitu SMK Negeri 1 Lubuklinggau. 2)

Kerja sama yang terbina antara Lembaga Pemerintah dan Swasta dengan pihak sekolah yang menurut peneliti memiliki keunikan dibanding DU/DI yang lain membuat peneliti tertarik untuk mengangkat peran serta Lembaga Pemerintah dan Swasta selaku Institusi Pasangan dalam mewujudkan partisipasinya pada kegiatan prakerin bagi siswa SMK Program Keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah umum: “Bagaimana partisipasi lembaga pemerintah dan swasta dalam kegiatan prakerin siswa program keahlian akuntansi dan administrasi perkantoran di SMK Negeri 1 Lubuklinggau?

Rumusan masalah khusus: (1) Bagaimana partisipasi pemerintah dalam membimbing siswa SMK Negeri 1 Lubuklinggau pada kegiatan praktik kerja industri?; (2) Bagaimana partisipasi pemerintah dalam memberikan fasilitas siswa SMK Negeri 1 Lubuklinggau pada kegiatan praktik kerja industri?; (3) Bagaimana partisipasi lembaga swasta dalam membimbing siswa SMK Negeri 1 Lubuklinggau pada kegiatan praktik kerja industri?; (4) Bagaimana partisipasi lembaga swasta dalam memberikan fasilitas siswa SMK Negeri 1 Lubuklinggau pada kegiatan praktik kerja industri?; (5) Apakah Faktor Pendorong dan Penghambat dalam melaksanakan kegiatan prakerin di lembaga pemerintah dan lembaga swasta?; dan (6) Bagaimanakah solusi inovatif dalam meningkatkan hubungan antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta dengan pihak sekolah?

Tujuan umum penelitian adalah mendeskripsikan bagaimana lembaga pemerintah dan swasta dalam kegiatan prakerin program keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran di SMK Negeri 1 Lubuklinggau. Sedangkan tujuan khusus adalah: (1) Mendeskripsikan partisipasi pemerintah dalam membimbing siswa SMK Negeri 1 Lubuklinggau pada kegiatan praktik kerja industri?; (2) Menganalisis partisipasi pemerintah dalam memberikan fasilitas siswa SMK Negeri 1 Lubuklinggau pada kegiatan praktik kerja industri?; (3) Menganalisis partisipasi lembaga swasta dalam membimbing siswa SMK Negeri 1 Lubuklinggau pada kegiatan praktik kerja industri?; (4) Menganalisis partisipasi lembaga swasta dalam memberikan fasilitas siswa SMK Negeri 1 Lubuklinggau pada kegiatan praktik kerja industri?; (5) Mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat kegiatan prakerin di lembaga pemerintah dan swasta?; dan (6) Merumuskan solusi inovatif untuk meningkatkan hubungan antara lembaga pemerintah dan swasta dengan pihak sekolah?

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik dari segi teoritis/pengembangan ilmu, maupun segi praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan, dalam hal ini usaha untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan melalui pengembangan kurikulum Pendidikan Sistem Ganda (*Land and Mach*). Penelitian ini juga diharapkan bisa member

SMK, Depdiknas, dan Institusi Pasangan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan Prakerin.

METODE

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Arikunto (2002:12) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif pelaksanaannya terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi yang sewajarnya. Jadi penelitian deskriptif kualitatif merupakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data dan menyajikan informasi yang akurat dan objektif yang terjadi di lapangan terutama mengenai Kiat Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMK Negeri 1 Lubuklinggau dan menarik kesimpulan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk mengumpulkan data kualitatif atau temuan-temuan lapangan yang berguna bagi penyusunan studi ini, dimana data tersebut relatif sulit jika hanya dicari dengan metode survei.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian kualitatif proses analisis data berlangsung sebelum peneliti ke lapangan, kemudian selama di lapangan dan setelah di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiono (2008: 90) bahwa analisis telah dimulai sejak dirumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan terus berlanjut sampai penulisan hasil penelitian. Sementara itu, analisis data menurut Bogdan dan Biklen (Maleong, 2011: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data melalui teknik deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data; (2) Reduksi Data; (3) Penyajian Data, dan (4) Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemerintah dalam Kegiatan Prakerin

Pemerintah dapat kita sebut sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta membaangun masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu system pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, manage, serta mengatur jalannya suatu system pemerintahan. Pemerintah secara tidak langsung mengatur hidup kita dari sejak dalam kandungan hingga setelah meninggal pun.

Pemerintahan secara awam dapat didefinisikan sebagai sesuatu kegiatan yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang harus dijalankan yang bersumber dari pemerintah, atau lebih simple lagi yaitu,

Pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti halnya Pemerintah, Pemerintahan juga memiliki definisi secara keilmuan. Prof. Ermana Suradinata mengatakan bahwa pemerintah adalah lembaga atau badan-badan public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.

Hal ini senada yang disampaikan oleh C.F. Strong bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan public yang meliputi kegiatan legislative, eksekutif dan yudikatif dalam usaha untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan public yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada

mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Pemerintah Indonesia adalah cabang utama pada pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Pemerintah Indonesia dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Sebelum tahun 2004, sesuai dengan UUD 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau (bila perlu) pemerintah federal. "Pemerintah daerah" hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing negara memiliki sejenis pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Dalam masyarakat primitif, tingkat pemerintah daerah terendah adalah kepala desa atau kepala suku.

Lembaga Swasta dalam Kegiatan Prakerin

Pengertian Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan bentuk BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan sebuah bentuk Badan Usaha selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Kooperasi. Seluruh modal yang dimiliki atau dibelanjakan adalah milik swasta dan campuran tangan pemerintah. Perusahaan BUMS juga tak lupa menanamkan prinsip-prinsip ekonomi. Tujuan dibentuknya BUMS adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya demi kemakmuran para pemilik modal, pemilik perusahaan serta karyawan.

Pelaksanaan Program Keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran.

Animo masyarakat untuk masuk di SMK Negeri 1 Lubuklinggau begitu besar, ini ditandai dengan terus meningkatnya jumlah peminat siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 Lubuklinggau, pada tahun pembelajaran 2014/2015 tercatat jumlah peminat siswa yang mendaftar mencapai 710 siswa tapi yang tertampung hanya 318 siswa saja, mengingat daya tampung yang terbatas. Ini pula menjadi indikator keberhasilan SMK Negeri 1 Lubuklinggau dalam menghasilkan tenaga kerja menengah yang berkualitas sehingga lulusan dari SMK Negeri 1 Lubuklinggau bisa diterima di Dunia Kerja/ Dunia Industri, bekerja mandiri atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, karena tanpa adanya keberhasilan tersebut tidak mungkin kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan putranya di SMK Negeri 1 Lubuklinggau bisa tetap terjaga.

Pembelajaran

Salah satu faktor yang paling urgen dalam proses pembelajaran adalah kurikulum. Salah satu prinsip yang dianut dalam Kurikulum SMK semenjak edisi 1994 sampai dengan saat ini (kurikulum SMK KTSP) adalah Berbasis ganda (dual based program); dilaksanakan di sekolah dan dunia usaha/industri. SMK Negeri 1 Lubuklinggau berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau dan DUDI dalam penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP dan menghasilkan kurikulum implementatif sehingga KTSP ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara lulusan SMK dengan kebutuhan DU/DI, meratifikasi kompetensi DU/DI yang dapat diadopsi terhadap kurikulum. Sejalan dengan diadopsinya kompetensi DU/DI terhadap kurikulum SMK Negeri 1 Lubuklinggau, perlu adanya penunjang yang mumpuni baik dalam pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi maupun sistem dalam perangkat pendidikan.

Pembimbing

Pembimbing Program Keahlian Program Keahlian Akuntansi dan administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Lubuklinggau merupakan Pembimbing yang berpengalaman dan profesional, sebagian besar pernah bekerja di Dunia Usaha/ Dunia Industri sehingga etos kerja dan profesionalismenya tidak diragukan lagi, selain itu, Pembimbing tersebut berkualifikasi S1 serta mempunyai kesesuaian latar belakang pendidikan dengan kompetensi yang di ajarkan di Program Keahlian Ak

trasi Perkantoran . Selain itu Instruktur-instruktur Program Keahlian Keahlian Akuntansi dan administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Lubuklinggau bersertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Dunia Usaha/ Dunia Industri.

Fasilitas Praktik

Selain dari pembelajaran, fasilitas praktek juga sangat menentukan kualitas lulusan sebuah lembaga pendidikan kejuruan, dalam hal ini Program Keahlian Akuntansi dan administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Lubuklinggau, senantiasa melengkapi pasilitas prakteknya dengan mengupgrade alat-alat praktek disesuaikan dengan perkembangan akuntansi dan administrasi perkantoran. Walaupun demikian sehubungan dengan pesatnya dunia akuntansi dan administrasi perkantoran, untuk alat-alat tertentu kami tidak punya kemampuan untuk mengadakannya, tetapi kami bisa menyiasatinya dengan bekerja sama dengan institusi pasangan.

Dalam Sekolah menengah kejuruan sangat di perlukan adanya ruang praktik disetiap program keahlian, ini akan sangat mendukung siswa untuk dapat lebih mudah dalam menerima materi pelajaran yang nantinya langsung dipraktikan lapangan pada saat melaksanakan prakerin di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta atau Dunia Usaha / Dunia Industri.

Institusi Pasangan

Salah satu prinsip yang dianut dalam Kurikulum SMK semenjak edisi 1994 sampai dengan saat ini (kurikulum SMK KTSP) adalah Berbasis ganda (dual based program); dilaksanakan di sekolah dan dunia usaha/ Industri. Dengan demikian peran institusi pasangan sangat penting sekali karena institusi pasangan berperan untuk ikut andil dalam proses. Jadi peran dari institusi pasangan bukan hanya tempat praktek kerja industri saja atau sertifikasi lulusan saja, melainkan dalam semua proses pendidikan termasuk dalam penyusunan KTSP dan evaluasi implementasi dari kurikulum tersebut. Prakerin berlangsung selama 6 bulan.

Relevansi Kompetensi Siswa Program Keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran

Standar kompetensi adalah suatu bentuk kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan oleh suatu bidang pekerjaan oleh seluruh stakeholders. Sedangkan kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang

dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Dengan demikian kompetensi Program Keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran merupakan kemampuan seseorang yang terobservasi melalui berbagai cakupan atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan standar yang ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Program Keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran.

Kaitan Kompetensi Siswa Program Keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran

Berdasarkan hasil analisis tentang relevansi kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Program Keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran dengan kebutuhan DU/DI Akuntansi dan Administrasi Perkantoran di Kota Lubuklinggau diketahui bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Program Keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran di Kota Lubuklinggau telah berhasil menyiapkan sumber daya manusia, dalam hal ini siswa Program Keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran, dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan DU/DI Akuntansi dan Administrasi Perkantoran di Kota Lubuklinggau karena untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri tersebut pihak DU/DI Akuntansi dan Administrasi Perkantoran telah merumuskan standar kompetensi yang dibutuhkan secara nasional yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Program Keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran Tahun 2005. Bagi pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Program Keahlian Akuntansi dan Administrasi Perkantoran di Kota Lubuklinggau menggunakan standar tersebut sebagai acuan dalam mengembangkan program keahlian dan kurikulum, sedangkan bagi pihak birokrat (pemerintah) akan menggunakannya sebagai acuan dalam perumusan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia secara makro.

Pengembangan ini akan dapat menyesuaikan kompetensi para lulusannya dengan DU/DI Akuntansi dan Administrasi Perkantoran di masa yang akan datang. Oleh karena itu pengembangan kompetensi adalah hal yang sangat menjanjikan bagi strategi pengembangan dunia usaha

institusi pendidikan. Filosofi dan definisi pengembangan wilayah secara jelas telah menekankan betapa pentingnya peranan sumber daya manusia dalam keberhasilan pengembangan suatu wilayah, sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek. Dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki motivasi dan kemampuan untuk mengelola sumber daya wilayah untuk meningkatkan kualitas Sumber daya manusia itu sendiri.

Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan telah banyak dilakukan, tetapi masih dihadapkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang paling krusial adalah rendahnya mutu pendidikan. Salah satu faktor penyebab permasalahan tersebut yakni minimnya peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan sekolah. Dunia pendidikan Indonesia saat ini setidaknya menghadapi empat tantangan besar yang kompleks. Pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*). Kedua, tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam terhadap terjadinya transformasi (perubahan) struktur masyarakat, dari masyarakat agraris ke masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi sehingga berimplikasi pada tuntutan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu bagaimana meningkatkan daya saing bangsa dalam meningkatkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Keempat, munculnya kolonialisme baru di bidang iptek dan ekonomi menggantikan kolonialisme politik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta rumusan masalah yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan masalah umum dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu kelulusan program Keahlian Akuntansi dan administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Lubuklinggau sangat di butuhkan sekali peran serta lembaga pemerintah dan swasta dalam kegiatan praktik kerja industri agar adanya kesepadanan dan kesesuaian (*link and match*) antara kompetensi yang didapat di sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri dalam hal

ini lembaga pemerintah dan lembaga swasta agar tamatan yang dihasilkan memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Berdasarkan rumusan masalah khusus dapat disimpulkan bahwa :

Pertama, partisipasi pemerintah dalam membimbing siswa SMK Negeri 1 Lubuklinggau pada kegiatan praktik kerja industri memberikan arahan kepada siswa yang melaksanakan prakerin dan selanjutnya memberikan pembagian tugas sesuai dengan program keahlian akuntansi dan administrasi perkantoran. Bagi sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kota Lubuklinggau, upaya untuk meningkatkan mutu khususnya dalam rangka pencapaian pembelajaran telah dilaksanakan secara berkesinambungan baik dalam pencapaian standar nasional pendidikan (SNP). Dalam proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan untuk meningkatkan hasil lulusan yang baik, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kinerja guru dalam pelaksanaan tugas melalui pembelajaran. Kinerja mengajar guru sebagai hal penting dalam proses pendidikan dan pengajaran ditelusuri dan didasarkan pada berbagai teori yang telah dikembangkan oleh para ahli. Guru sebagai pendidik ataupun pengajar merupakan faktor penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan.

Kedua, partisipasi pemerintah dalam memberikan fasilitas siswa SMK Negeri 1 Lubuklinggau pada kegiatan praktik kerja industri, dengan memberikan fasilitas pemerintah kepada siswa prakerin sesuai dengan program keahlian akuntansi dan administrasi perkantoran. Seperti memberikan fasilitas komputer dalam mengerjakan tugas administrasi perkantoran dan komputer akauntansi.

Karena diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam pembangunan, yaitu mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan sumbangannya sangat besar dan positif dalam upaya pengembangan wilayah. Siswa yang mengikuti pembelajaran dalam program Keahlian Akuntansi dan administrasi Perkantoran harus benar-benar mengikuti secara optimal agar materi yang disampaikan dapat diserap dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, partisipasi lembaga swasta dalam membimbing siswa SMK Negeri 1 Lubuklinggau pada kegiatan praktik kerja industri memberikan arahan kepada siswa yang melaksanakan prakerin

memberikan pembagian tugas sesuai dengan program keahlian akuntansi dan administrasi perkantoran.

Proses kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lubuklinggau memerlukan penguasaan materi dan tenaga yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk dapat meningkatkan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lubuklinggau diperlukan pengembangan kecakapan hidup mengedepankan aspek-aspek : (1) kemampuan yang relevan untuk dikuasai peserta didik, (2) materi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, (3) kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik untuk mencapai kompetensi, (4) fasilitas, dan sumber belajar yang memadai, dan (5) kemampuan-kemampuan yang dapat diterapkan dalam pendidikan peserta didik.

Keempat, partisipasi lembaga swasta dalam memberikan fasilitas siswa SMK Negeri 1 Lubuklinggau pada kegiatan praktik kerja industri, dengan memberikan fasilitas pemerintah kepada siswa prakerin sesuai dengan program keahlian akuntansi dan administrasi perkantoran. Seperti memberikan fasilitas komputer dalam mengerjakan tugas administrasi perkantoran dan komputer akuntansi.

Kemungkinan terlaksananya praktik kerja industri (PRAKERIN) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat bergantung kepada ketersediaan dunia usaha dan industri menjadi pasangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk bekerjasama melaksanakan program tersebut, karena ikut berperan dalam penyelenggaraan praktik kerja industri (PRAKERIN) sebelum menjadi kewajiban yang diatur dalam undang-undang.

Kelima, Faktor Pendorong dan Penghambat dalam melaksanakan kegiatan prakerin di lembaga pemerintah dan lembaga swasta, Faktor pendorong adalah siswa prakerin dapat mengaplikasikan materi pelajaran sekolah ke lembaga pemerintah dan swasta (link and match)

Faktor penghambat adalah masih ada materi pelajaran produktif yang didapat dari sekolah tidak sesuai dengan kegiatan prakerin di lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Kurikulum pendidikan kejuruan dalam implementasi kegiatan pembelajaran perlu didukung oleh fasilitas belajar yang memadai, karena untuk mewujudkan situasi belajar yang dapat mencerminkan situasi dunia kerja secara realistis dan edukatif, diperlukan banyak

perlengkapan, sarana dan perbekalan logistik. Bengkel kerja dan laboratorium adalah kelengkapan utama dalam sekolah kejuruan yang harus ada sebagai fasilitas bagi peserta didik di dalam mengembangkan kemampuan kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri.

Keenam, solusi inovatif dalam meningkatkan hubungan antara lembaga pemerintah dan lembaga swasta dengan pihak sekolah Kompet Program Keahlian Akuntansi dan administrasi Perkantoran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lubuklinggau dipersiapkan untuk dapat bekerja dan membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan program keahlian yang mereka miliki. Lulusan mampu bersaing karena kepercayaan DUDI terhadap lulusan program Keahlian Akuntansi dan administrasi Perkantoran yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Lubuklinggau mampu memberikan kontribusi kepada lembaga pemerintah dan swasta atau dunia usaha dan industri (DUDI).

Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut : Bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Pendidikan untuk lebih meningkatkan kinerja mengajar guru (tenaga pendidik produktif) dengan mengirim tenaga pendidik mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta sesuai dengan program keahlian yang diampunya, dengan kata lain para guru terus mengikuti perkembangan ilmu Akuntansi dan administrasi Perkantoran dan melengkapi sarana prasarana agar lebih memadai di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Program Keahlian Akuntansi dan administrasi Perkantoran sesuai dengan ketentuan Permen-diknas RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta menjalin kerjasama yang lebih baik dengan dunia usaha/dunia industri perkantoran sebagai institusi pasangan dalam hal praktik kerja industri bagi para siswa Program Keahlian Akuntansi dan administrasi Perkantoran.

Kompetensi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Program Keahlian Akuntansi dan administrasi Perkantoran yang sudah baik agar terus dilakukan peningkatan dan penyempurnaan agar semakin relevan dengan kondisi dan kebutuhan DU/DI Akuntansi dan

administrasi Perkantora di Kota Lubuklinggau di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Candra Sriretno. 2001. *Partisipasi Institusi Pasangan dalam Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di SMK Negeri IX Semarang tahun 2001*. Tesis. Semarang: Program Pasca Sarjana UNNES
- Made Wena. 1996. *Pendidikan Sistem Ganda*. Bandung : Tarsito.
- Nolker H, dan Schonfeldt, E. 1983. *Pendidikan Kejuruan: Pengajaran, Kurikulum, Perencanaan*. Diterjemahkan oleh Agus Setiadi. Jakarta: Gramedia.
- Permana, Tatang. 2005. *Pemahaman Konsep PSG dan Intensitas Bimbingan Terhadap Kemampuan Siswa PSG*. Invotec. Vol III, No. 7, Agustus 2005: 33-39. Bandung: UPI.
- Sutisna, Oteng. 1985. *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*. Bandung: Angkasa.
- Wardiman, D. 1994. *Kebijakan dan Program Pengembangan pendidikan Kejuruan di Indonesia, disajikan dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Fakultas Pendidikan teknologi dan Kejuruan Se-Indonesia*, di IKIP Surabaya, tanggal 28 November 1994.